



SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM)

Nomor: 00053/SPPM/WK/SCM/WAA/2026

Tanggal: 19 Januari 2026

No. PO SAP: 4100069920

Antara

WASKITA – BRP – CK, JV

Dan

PT. Lautan Deltamas Sejahtera

Untuk melaksanakan

Pengadaan Unit Pompa Booster

**PROYEK CONSTRUCTION OF KSCS PACKAGE I (JOP
55%)**

ID Proyek: 1425027



Daftar Isi

PASAL 1 DEFINISI.....	4
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN	6
PASAL 3 JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI	6
PASAL 4 SPESIFIKASI DAN KUALITAS.....	7
PASAL 5 JANGKA WAKTU PENGADAAN MATERIAL	8
PASAL 6 SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN	8
PASAL 7 PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN.....	10
PASAL 8 JAMINAN PENGADAAN MATERIAL	10
PASAL 9 KLAIM KENAIKAN HARGA	10
PASAL 10 PEMERIKSAAN MUTU	10
PASAL 11 SANKSI	11
PASAL 12 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	11
PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE.....	12
PASAL 14 RISIKO.....	12
PASAL 15 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG	13
PASAL 16 PENYUAPAN DAN KORUPSI.....	13
PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	14
PASAL 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN	14
PASAL 19 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI.....	15
PASAL 20 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU DAN PENGAMANAN (K3LMP).....	16
PASAL 21 KERAHASIAAN	17
PASAL 22 LAIN-LAIN	17
PASAL 23 PENUTUP	17

SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026)** bertempat di **Jakarta**, yang bertandatangan di bawah ini:

I. WASKITA – BRP – CK, JV

Nama : Bonie Butar Butar

Jabatan : Kuasa WASKITA – BRP – CK, JV

Secara sah bertindak untuk dan atas nama WASKITA-BRP-CK JV., suatu badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO), yang beranggotakan; PT. Waskita Karya (Persero), Tbk., PT. Basuki Rahmanta Putra dan CK Solution Co., Ltd, Masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara langsung atas semua kewajiban terhadap pejabat penandatanganan kontrak sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 01/ WASKITA-BRP-CK JOINT VENTURE/KSCS PACKAGE 1/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dan Addendum ke I Nomor 01/ADD01/WASKITA-BRP-CK JOINT VENTURE/KSCS PACKAGE 1/XI/2025 tanggal 19 November 2025. Berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lt. 15 Jl. MT. Haryono Kavling No. 12-13, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330 untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"

II. **Nama : Rudi Hartono** **Jabatan : Direktur**

Secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. Lautan Deltamas Sejahtera, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 17 September 2024, yang dibuat di hadapan Githa Nadya Marinda, S.H.,. Notaris di Jakarta Pusat akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075957.AH.01.01 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Terbatas No. AHU-0206562.AH.01.11 tanggal 27 September 2024, berkedudukan di Springhill Office Tower Kemayoran LT 3C 31, kodepos 14410 , dalam hal ini diwakili oleh Rudi Hartono yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 18 tanggal 17 September 2024 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Lautan Deltamas Sejahtera untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat untuk **Pengadaan Paket Material Unit Pompa Booster** untuk keperluan **Pihak Pertama**, yang akan dipergunakan pada **Proyek Construction of KSCS Package 1 JOP 55%** dan menyetujui untuk menandatangani bersama, berdasarkan:

1. Surat Penawaran Pengadaan Material Unit Pompa Booster No. QP-024/LDS/AR/I/2026, tanggal 09 Januari 2026,
2. Klarifikasi dan negosiasi harga antara **Para Pihak** pada tanggal 13 Januari 2026,

3. Surat Pengumuman pemenang No. 000791/WK/WeProc/PNM/000013-WAA-2026 tanggal 14 Januari 2026
4. Surat Penetapan pemenang No. 000791/WK/WeProc/PNT/000013-WAA-2026 tanggal 19 Januari 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat sebagai Supplier dan menyetujui untuk menandatangani **Perjanjian Pengadaan Paket Material Unit Pompa Booster** (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"). Dengan ini **Pihak Kedua** wajib menyelesaikan pengadaan dengan baik dan sempurna sehingga dapat diterima oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** bersedia membayar atas penyelesaian pengadaan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam **Perjanjian** ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut:

- (1) Lampiran A Data Pekerjaan
 - a. Bill of Quantity (BoQ)
 - b. Spesifikasi Teknis
 - c. *Gambar*
- (2) Lampiran B Penawaran Harga **Pihak Kedua**
- (3) Lampiran C Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- (4) Lampiran D Rincian Harga Satuan
- (5) Lampiran E Surat Pernyataan Kesanggupan
- (6) Lampiran F Surat Pengumuman Pemenang
- (7) Lampiran G Surat Penetapan Pemenang
- (8) Lampiran H Jadwal Pengadaan
- (9) Lampiran I Surat Pernyataan Non TKDN

Dokumen-dokumen di atas menggantikan seluruh komunikasi dan klarifikasi yang pernah dibuat sebelumnya oleh **Para Pihak**, baik secara lisan maupun tertulis. Seluruh komunikasi dan klarifikasi tersebut dengan ini dinyatakan batal dan tidak ada suatu ketentuan, pernyataan, atau perjanjian yang dikeluarkan oleh **Pihak Pertama** atau setiap pejabat atau karyawan **Pihak Pertama** yang mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam **Perjanjian** ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Di dalam Perjanjian ini (sebagaimana selanjutnya didefinisikan) semua perkataan dan ungkapan mempunyai arti yang sama seperti yang tersebut dalam Perjanjian Utama, kecuali apabila ditentukan lain atau apabila pengertiannya mengharuskan lain sebagaimana termaksud di bawah ini:

- 1.1 **Perjanjian**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** berikut lampiran-lampiran lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 1.2 **Perjanjian Utama**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan Pengguna Jasa berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya

yang menjadi satu kesatuan untuk diketahui dan ditaati oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.

- 1.3 **Pengguna Jasa**, berarti **Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku II SNVT PJPA Cidanau Ciujung Cidurian, BBWS Cidanau Ciujung Cidurian berkedudukan di Jalan Ustadz Yachya No. 1 Serang, Banten 42117** yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus pemilik proyek yang terikat dengan **Pihak Pertama** berdasarkan **Perjanjian Utama**.
- 1.4 **Pekerjaan**, berarti pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/material, peralatan perencanaan dan perijinan serta semua perhitungannya termasuk Masa Garansi yang menjadi lingkup pekerjaan **Pihak Kedua**.
- 1.5 **Harga Pekerjaan**, berarti jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara **Pekerjaan** yang akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- 1.6 **Pekerjaan tambah/kurang**, berarti suatu pekerjaan tambah/kurang atau penambahan atau pengurangan Pekerjaan atau bagian/tahapan dari **Pekerjaan**, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan **Pekerjaan**, baik itu didalam atau diluar lingkup pekerjaan **Pihak Kedua** yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini dan dinyatakan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
- 1.7 **Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** yang memuat keterangan bahwa material yang dikirim oleh **Pihak Kedua** telah diterima oleh **Pihak Pertama** dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- 1.8 **Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** yang memuat perhitungan pengiriman yang telah dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dengan merujuk kepada Persyaratan Teknis.
- 1.9 **Berita Acara Pembayaran (BAP)**, adalah berita acara yang dikeluarkan **Pihak Pertama** yang menyatakan pengiriman material yang dilakukan **Pihak Kedua** telah dapat dilakukan pembayaran karena telah memenuhi Persyaratan Teknis dan syarat-syarat kelengkapan administrasi lainnya.
- 1.10 **Konsultan Pengawas**, berarti badan atau perorangan yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Utama** untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama termasuk Pekerjaan dalam **Perjanjian** ini.
- 1.11 **Serah Terima Pertama**, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa pengiriman material yang dilaksanakan **Pihak Kedua** telah selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Persyaratan Teknis dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- 1.12 **Masa Garansi**, berarti suatu jangka waktu dimana **Pihak Kedua** diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil **Pekerjaan** sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil **Pekerjaan**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama bersedia membeli dari **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** bersedia menjual dengan baik **Pengadaan Paket Material Unit Pompa Booster** sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dokumen Kontrak Utama, sesuai contoh material yang telah disetujui **Pihak Pertama** dan akan dipergunakan untuk **Proyek Construction of KSCS Package 1 JOP 55%**, dengan perincian kualitas dan prakiraan volume dan harga satuan yang tercantum dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.

PASAL 3 JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI

- Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah sebesar **Rp. 51.655.402.890,-** Terbilang: **Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah** (Termasuk PPN) Rincian Harga Pekerjaan sebagaimana dalam **Lampiran D**.
- Jenis dan kualitas material serta prakiraan volume yang harus diadakan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebagaimana terperinci dalam **Lampiran A**.
- Harga satuan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat **Fix Unit Price**, harga **Franco** Proyek di **Atas Pedestal Pihak Pertama** sampai dengan volume kebutuhan terpenuhi seluruhnya.
- Jenis dan kualitas material sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini selanjutnya dalam **Perjanjian** ini disebut **Material**.
- Harga satuan **Material** sudah termasuk didalamnya biaya sebagai berikut :

No	Uraian
1	Set Pompa Booster Kapasitas 2 m3/sec Brand Andritz COO : Austria
2	Set Pompa Booster Kapasitas 1 m3/sec Brand Andritz COO : Austria
3	Set Panel Inverter Brand Komponen Schneider COO : China
4	Garansi Pompa selama 24 Bulan dari BAST 1
5	Jaminan Ketersediaan Sparepart Selama 20 Tahun
6	Penyediaan Sparepart selama 2 Tahun Untuk Pompa Kapasitas 2 m3/sec : 4 pcs O-Ring, 1 pcs Mechanical Seal, 1 Set Bearing, Oil Seal/V Ring 1 Set, Wearing 1 Set, Impeller & Shaft 1 Set, Motor Bearing
7	Penyediaan Sparepart selama 2 Tahun Untuk Pompa Kapasitas 1 m3/sec : 2 pcs O-Ring, 1 pcs Mechanical Seal, 1 Set Bearing, Oil Seal/V Ring 1 Set, Wearing 1 Set, Impeller & Shaft 1 Set, Motor Bearing
8	Factory Visit (Cek Pabrik) di Austria sebanyak 35 Orang, Termasuk Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
9	FAT di China sebanyak 35 Orang, Termasuk Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi
10	Termasuk Leveling Aligment, mounting, Setting Bolt, Lifting Tools, Shimplate, Temporary Support

11	Termasuk Supervisi pada saat Test Commisioning
12	Termasuk Supervisi pada saat Trainning End user
13	Penyediaan Manual Book (Bilingual)

6. Nilai Jual Beli tersebut di atas bersifat prakiraan. Nilai Jual Beli yang sebenarnya adalah realisasi pengiriman **Material**, sesuai dengan permintaan dan yang diterima oleh **Pihak Pertama** sesuai harga satuan yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat 1 **Perjanjian** ini.

PASAL 4 SPESIFIKASI DAN KUALITAS

1. **Pihak Kedua** wajib dan dianggap sudah mengetahui (kecuali harga pekerjaan dan dokumen klarifikasi) serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan-persyaratan dalam **Perjanjian Utama** (Spesifikasi Teknis), termasuk ketentuan tentang masa garansi khususnya yang berkaitan dengan **Material**. **Pihak Pertama** (apabila diminta **Pihak Kedua**) akan memberi kepada **Pihak Kedua** copy dari Spesifikasi Teknis Material atas biaya **Pihak Kedua**.
2. **Material** tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 **Perjanjian** ini harus dalam keadaan baru, memenuhi standar mutu/spesifikasi teknis yang dapat diterima **Pihak Pertama** dan **Konsultan Pengawas**.
3. Untuk menjamin kesesuaian kualitas **Material**, maka sebelum **Material** dikirim ke lapangan, **Pihak Kedua** diwajibkan untuk melaksanakan test sebagaimana dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis atas beban biaya **Pihak Kedua**.
4. Penanganan mutu secara kontinyu dimulai pada saat proses produksi sampai dengan pengiriman.
5. **Material** yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan akan diafkir/ditolak dan **Pihak Kedua** wajib mengganti material tersebut atas biaya **Pihak Kedua** dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.
6. **Pihak Kedua** wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di bawah paling lambat pada saat penagihan terakhir:
 - a. Surat keterangan COO
 - b. Buku manual Operasional dan *Maintenance*
 - c. Brosur dan *Technical Data Sheet*
 - d. Surat dukungan Pabrik
 - e. Surat jaminan ketersediaan *sparepart*
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh terhadap kesesuaian spesifikasi dan kualitas/mutu sesuai ayat 1 diatas, apabila terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan kualitas/mutu maka segala resiko yang timbul (biaya penggantian, biaya perbaikan, biaya test, dan sebagainya) menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENGADAAN MATERIAL

1. Pengiriman **Material** ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau mengikuti jadual induk, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya **Perjanjian** ini dari tanggal **19 Januari 2026** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2026** dan pada tanggal tersebut seluruh **Material** harus sudah diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dan disetujui oleh **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa**.
2. **Pihak Kedua** harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan **Material** sesuai dengan jadwal kebutuhan lapangan sampai dengan kebutuhan dilapangan terpenuhi seluruhnya.
3. Apabila terjadi keterlamabatan dalam pengiriman material sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini yang disebabkan oleh suatu hal di luar kewajiban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**, maka Pihak Pertama akan mempertimbangkan pemberian penambahan jangka waktu pengadaan material berdasarkan permohonan tersebut paling lambat harus diserahkan kepada **Pihak Pertama 14 (empat belas) hari** sebelum tanggal selesainya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
4. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini akan dinyatakan dalam Addendum, segala biaya (Preliminaries dan Overhead) termasuk namun tidak terbatas yang timbul akibat perpanjangan waktu ini menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 6 SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN

1. Uang Muka 25%, pembayaran uang muka akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah ditanda tanganinya Perjanjian oleh Kedua Belah Pihak dan setelah **Pihak Kedua** menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi sebesar jumlah Uang Muka yang diterima oleh **Pihak Kedua** yang disetujui **Pihak Pertama** yang masa berlakunya sampai dengan ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama. Pengembalian Uang Muka oleh **Pihak Kedua** dilakukan secara proposional dari nilai sertifikat pembayaran pertama dari nilai kontrak atau Addendum jika ada. **Pihak Kedua** berkewajiban menggunakan Uang Muka tersebut dengan maksimal sehingga **Pihak Kedua** dapat memenuhi progres sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan. Pembayaran Reguler Tempo 60 hari.
2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progres **Material** diterima di lapangan dengan melampirkan **Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)** dan **Berita Acara Pembayaran (BAP)** dan kelengkapan lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan pada ayat 5 pasal ini.
3. **Pihak Kedua** harus menerbitkan Surat Pernyataan Garansi Produk kepada **Pihak Pertama** untuk menjamin kualitas dan kuantitas dari **Material** yang diadakan/dikirim oleh **Pihak Kedua**, apabila dalam jangka waktu pengadaan material dan 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengadaan material terdapat

gagal produk dari sisi kualitas dan kuantitas maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

4. Setiap tahapan pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilaksanakan dengan skema *Progress Payment* : 90% *Material on Site*, 10% *Setelah Test Commisionning* sesuai dengan Prosedur Keuangan **Pihak Pertama**.
5. Kuitansi diterima **Pihak Pertama** dengan dilengkapi lampiran-lampirannya secara lengkap dan benar sesuai ketentuan akuntansi, sebagai berikut:
 - a. Asli Kwitansi
 - b. Copy Faktur Pajak dan Copy SPT bulan terakhir
 - c. Copy Jaminan Uang Muka
 - d. Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)
 - e. Berita Acara Pembayaran
 - f. Surat jalan asli yang telah distempel dan ditandatangani oleh security & petugas gudang;
 - g. Surat Penyaluran Rekening Bank
 - h. Copy Kontrak dan Addendum (jika ada)
 - i. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kualifikasi Usaha.
 - j. NPWP/NIK
 - k. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
 - l. Sesuai lampiran kelengkapan tagihan dalam Perjanjian ini.
6. **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran di luar PPN
7. Pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan ke Rekening **Pihak Kedua** sebagai berikut :

Kantor Bank	: Bank Negara Indonesia
No. Rekening	: 1915566345
Atas nama	: PT. Lautan Deltamas Sejahtera
8. Dalam hal karena suatu kondisi atau atas hal apapun mengharuskan **Pihak Pertama** untuk melakukan pembayaran kepada **Pihak Kedua** ke Nomor Rekening yang berbeda namun masih atas nama **Pihak Kedua**, maka pembayaran tersebut tetap di nyatakan sah, di setuju dan di terima oleh **Pihak Kedua** tanpa keharusan dilakukan Addendum perjanjian. Atas pembayaran tersebut, **Pihak Kedua** juga membebaskan **Pihak Pertama** dari segala tuntutan dan/atau klaim dari **Pihak Ketiga** atau Pihak manapun, serta **Pihak Kedua** menyatakan bersedia menanggung seluruhnya termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan dan/klaim yang timbul tersebut.
9. **Pihak Pertama** berhak menahan atau menunda pembayaran baik seluruh atau sebagian dari jumlah yang ditagih oleh **Pihak Kedua**, apabila:
 - 9.1. Kualitas atau kuantitas Material yang dimaksudkan dalam Berita Acara menyimpang dari kebenaran, meskipun Berita Acara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan disetujui **Pihak Pertama** dan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, atau;
 - 9.2. Kualitas atau kuantitas yang tercantum dalam Berita Acara tidak disetujui sepenuhnya oleh **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa** sebagai akibat kelalaian/ kegagalan **Pihak Kedua**, atau;

- 9.3. Timbul perselisihan antara **Para Pihak** atau **Pihak Pertama** dengan **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa**, yang mempersoalkan pengukuran, kualitas atau hal lain yang tercantum dalam Berita Acara dimaksud.

PASAL 7

PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN

Pihak Kedua atas biayanya sendiri bertanggungjawab terhadap semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pajak, cukai dan pungutan lainnya yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

JAMINAN PENGADAAN MATERIAL

Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan material menurut Surat **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan kepada **Pihak Pertama** berupa Asuransi Jaminan Pengadaan Material sebesar 5% (Lima Persen) dari Nilai Kontrak.

PASAL 9

KLAIM KENAIKAN HARGA

Pihak Kedua tidak dibenarkan menuntut/klaim biaya tambahan kenaikan harga, sampai dengan kebutuhan dilapangan sesuai **Perjanjian** ini terpenuhi seluruhnya.

PASAL 10

PEMERIKSAAN MUTU

1. Inspeksi **Material** akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** dan/atau **Konsultan Pengawas** atas dasar spesifikasi tersebut di atas. Pemeriksaan **Material** tersebut akan dilakukan sebelum **Material** dikirim dan harus disaksikan oleh **Para Pihak**.
2. Dalam hal **Pihak Kedua** telah mengirimkan **Material** ke lokasi **Proyek** namun belum dilakukan pemeriksaan mutu **Material** oleh **Pihak Pertama** dan/atau **Konsultan Pengawas**, maka Pemeriksaan mutu **Material** akan dilaksanakan **Pihak Pertama** dan/atau **Konsultan Pengawas** dengan segala risiko terhadap pemenuhan mutu merupakan tanggung jawab oleh **Pihak Kedua**.
3. Dalam hal khusus atas permintaan **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa** menghendaki pemeriksaan ditempat lain (Laboratorium Indenpenden) atau instansi yang ditunjuk, **Pihak Kedua** wajib memenuhi persyaratan tersebut dengan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 11 SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan kualitas/mutu dari yang disyaratkan dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini atau tidak tercapainya mutu benda uji yang tersebut dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini yang menyebabkan pekerjaan dibongkar akibat dari **Material** yang dikirim, maka **Pihak Kedua** wajib mengganti **Material** yang dibongkar tersebut dan segala kerugian/biaya yang timbul akibat penyimpangan mutu tersebut menjadi beban **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan **Material** tersebut sebagian atau keseluruhan sebagaimana syarat-syarat dalam **Perjanjian** ini maupun jadwal yang telah ditentukan dan bilamana **Pihak Pertama** dengan terpaksa mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasinya termasuk kemungkinan memberikan pengadaan **Material** tersebut kepada pihak lain, maka segala kerugian/biaya yang mungkin timbul menjadi beban **Pihak Kedua**, dengan pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila **Pihak Pertama** pada suatu waktu berkeyakinan bahwa **Pihak Kedua** karena kelalaiannya tidak dapat memenuhi kepentingan **Pihak Pertama** karena kurang/tidak mampu bekerja atau gagal melaksanakan tugasnya atau berbuat/melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan **Pihak Pertama** atau dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak, **Pihak Kedua** belum juga memulai kegiatannya, didahului peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, maka **Pihak Pertama** secara sepihak berhak mencabut dan memutuskan/membatalkan **Perjanjian** ini tanpa memberikan ganti rugi apapun.

PASAL 12 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

1. **Pihak Kedua** diwajibkan melampirkan komitmen/rencana nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau Self Assessment TKDN pada pengadaan *Pompa Booster* dengan nilai sebesar 95,53% (Sembilan Puluh Lima Koma Lima Puluh Tiga Persen) sesuai dengan Lampiran H.
2. **Pihak Kedua** wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri serta rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam menjalankan pengadaan Pengadaan material Pompa Booster.
3. **Pihak kedua** wajib memenuhi komitmen rencana pencapaian nilai TKDN pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Realisasi pencapaian TKDN agar disampaikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** setiap mengajukan tagihan kepada **Pihak Pertama** sesuai tata cara yang berlaku. Realisasi final pencapaian nilai TKDN pihak kedua tetap harus tunduk dan patuh pada perhitungan lembaga independen yang di tunjuk oleh pemberi pekerjaan dan/atau **Pihak Pertama**.

5. Apabila terdapat deviasi nilai antara nilai TKDN komitmen/rencana dengan nilai TKDN realisasi (TKDN realisasi lebih kecil dibanding TKDN komitmen) maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi kepada **Pihak Kedua** berupa penurunan status di *Waskita Application Vendor Excellence (WAVE)* dan diblokir di SAP selama rentang waktu 1 (satu) bulan.
6. Sanksi Turunan (Tanggung Renteng) Kepada Vendor / Rekanan Waskita atas Financial Claim terkait perbedaan pencapaian realisasi terhadap komitmen/rencana TKDN dari Pemilik Pekerjaan (Pengguna Barang dan Jasa) akan dibebankan kepada Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap keadaan memaksa/force majeure adalah hal-hal yang terjadi diluar kemampuan **Pihak Kedua** maupun **Pihak Pertama** seperti bencana alam, Epidem, kebakaran, banjir, peperangan, huru-hara umum, pemogokan yang bersifat memaksa dan berakibat langsung terhadap pengadaan Material dan jangka waktu pengadaan, yang disetujui secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa/force majeure, **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan bukti yang sah.
3. Atas pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, **Pihak Pertama** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa/force majeure tersebut dalam jangka waktu 7 x 24 jam, sejak pemberitahuan tersebut diterima atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Pada dasarnya **Pihak Pertama** hanya mempertimbangkan pemberian penambahan jangka waktu pengadaan Material atas terjadinya keadaan memaksa/force majeure, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat 3.

PASAL 14

RISIKO

1. Apabila selama waktu pelaksanaan pengadaan **Material** terjadi hambatan-hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan **Pihak Kedua**, maka segala resiko akibat kemacetan pengadaan/pengiriman **Material** ini sepenuhnya menjadi tanggung-jawab **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** selama melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** ini menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut-pautnya dalam pelaksanaan atau pengiriman Material ini), maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
3. Apabila **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** ini tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan atau ditolak oleh **Konsultan Pengawas** atau **Pengguna Jasa**, maka selambat-lambatnya 1 x 24jam, **Pihak Kedua** harus dengan

segera mengeluarkan dari lapangan dan mengganti kembali sejumlah yang ditolak dengan segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 15

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Apabila selama jangka waktu pengadaan terjadi perubahan yang dapat mengakibatkan pekerjaan tambah atau kurang dari Nilai Jual Beli maka akan dituangkan kedalam Addendum Perjanjian dengan mengacu harga satuan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. Pekerjaan Tambah/Kurang dianggap sah setelah mendapat perintah dan persetujuan **Pihak Pertama** secara tertulis.
3. Perhitungan penambahan atau pengurangan **Material** dilakukan atas dasar harga yang tercantum pada Pasal 3 **Perjanjian** ini, namun apabila harga satuan dimaksud tidak ditentukan daftar harga satuan **Material** dalam **Perjanjian** ini, maka harga satuan akan ditentukan kemudian.
4. Adanya pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah jangka waktu pengadaan **Material**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
5. Pekerjaan tambah boleh melebihi 10% dari nilai jual beli yang telah disepakati **Para Pihak** dalam perjanjian ini, namun apabila terdapat penambahan jenis material berbeda dengan spesifikasi tertentu di luar item yang tercantum dalam perjanjian ini maka Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 16

PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap Pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.
2. Suatu pelanggaran yang material oleh suatu Pihak atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam ayat 1 di atas dapat dianggap oleh suatu Pihak sebagai pelanggaran yang material terhadap **Perjanjian** ini dan akan memberi Pihak tersebut hak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di Pihak tersebut berdasarkan **Perjanjian** ini atau hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar harus mengganti rugi Pihak/Para Pihak lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran **Perjanjian** ini.
3. **Para Pihak** yang terlibat dalam pengadaan berdasarkan Perjanjian ini wajib mematuhi Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) terkait konflik kepentingan. Setiap **Pihak**

dilarang terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Apabila terjadi atau terindikasi adanya konflik kepentingan, **Pihak** yang bersangkutan wajib segera melaporkannya secara tertulis kepada **Pihak** lainnya untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Para Pihak** yang berkaitan dengan atau timbul karena **Perjanjian** ini baik selama pelaksanaan atau setelah selesai pengadaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dan segala hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir, dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila dalam waktu **14 (empat belas) hari** tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** tidak akan menggugat ke pengadilan (termasuk pengadilan niaga) kepada **Pihak Pertama**, Para Pihak akan menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT. 4 RW. 1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760.
3. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.
4. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, baik saat diselesaikan secara musyawarah ataupun badan arbitrase, maka **Pihak Kedua** tidak diperkenankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian** ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 18

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **Pihak Pertama** berhak melakukan Penghentian Sementara / Penundaan atas pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan **Perjanjian** yang mengakibatkan kerugian bagi **Pihak Pertama** sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. **Pihak Pertama** berhak memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak setelah melakukan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, apabila :
 - 2.1. **Pihak Kedua** telah memindah-tangankan pengadaan/pengiriman **Material** kepada pihak ketiga, atau;

- 2.2. Terhitung dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak permintaan lisan atau tertulis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhinya dan atau **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak **Perjanjian** ditandatangani tidak melanjutkan pengadaan/pengiriman **Material** yang telah dimulai/berjalan, atau;
 - 2.4. Terlambat melaksanakan sejumlah volume tahapan pengadaan/pengiriman **Material** berdasarkan jadwal seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini melebihi 7 (tujuh) hari kalender, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa (Force Majeure) dan Pasal 5 Ayat 3 , atau;
 - 2.5. **Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi atas keterlambatan **Pekerjaan** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.6. **Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material**.
3. Dalam hal **Pihak Kedua** dinyatakan bangkrut/pailit oleh Pengadilan Negeri atau Surat Ijin Usahanya dicabut atau tidak berlaku lagi, maka **Pihak Pertama** secara sepihak dapat membatalkan sebagian atau seluruh pengadaan **Material** menurut Perjanjian ini dan **Pihak Pertama** berhak mendapatkan ganti kerugian dari **Pihak Kedua** sebagai akibat peristiwa tersebut.
 4. Jika terjadi Pemutusan **Perjanjian** secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Pertama** dapat menunjuk pemasok lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pengadaan/pengiriman Material tersebut.
 5. Dalam hal Pemutusan **Perjanjian** ini secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut ganti rugi, tetapi masih berhak atas nilai-nilai Material yang telah diterima oleh **Pihak Pertama**. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang disetujui oleh **Para Pihak**.
 6. Sehubungan dengan pelaksanaan pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud **Perjanjian** ini, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk mengabaikan atau mengenyampingkan atau tidak mematuhi/menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 19

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. **Pihak Kedua** wajib untuk memberitahukan secara berkala kepada **Pihak Pertama** semua keterangan atau informasi atau perhitungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis demi berhasilnya pelaksanaan Pekerjaan, termasuk perubahan atau modifikasi metode pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
2. Korespondensi diantara **Para Pihak** ditujukan ke alamat berikut:
 - a. **Pihak Pertama**

Waskita – BRP – CK, JV

Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 15.
Jl. MT Haryono Kav. No. 12-13 Bidaracina,
Jatinegara, Jakarta Timur 13330

U.p. : Bonie Butar Butar
Telp. : 021-80600861
Email : infrastructurel@waskita.co.id

b. Pihak Kedua**PT Lautan Deltamas Sejahtera**

Springhill Office Tower Kemayoran
LT 3C 31, kodepos 14410

U.p. : Rudi Hartono
Telp. : +6285285571665
Email : financelds179@gmail.com

PASAL 20**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU
DAN PENGAMANAN (K3LMP)**

Dalam melaksanakan pekerjaan pengiriman material ini **Pihak Kedua** harus selalu memperhatikan, menjalankan dan menyelenggarakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP), sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga, menjalankan dan menyelenggarakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pihak Kedua** wajib melakukan koordinasi kerja (saat pengiriman) dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama dan bertanggung jawab atas koordinasi dimaksud.
3. **Pihak Kedua** wajib mengupayakan tidak ada kecelakaan kerja, timbulnya penyakit akibat kerja, timbulnya dampak negatif lingkungan kerja/lingkungan sosial dari dampak pekerjaan yang berakibat timbulnya korban jiwa, kesehatan, lingkungan.
4. **Pihak Kedua** wajib menyediakan sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.
5. **Pihak Kedua** wajib menangani keluhan bidang K3LMP dan memenuhi keluhan maksimal 2x24 jam.

6. **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pekerjaannya, wajib mencegah polusi, meningkatkan efisiensi kerja, mengefisienkan penggunaan dan merawat sumber daya alam serta mengutamakan produk yang ramah lingkungan.

PASAL 21 KERAHASIAAN

1. **Para Pihak** wajib menjadikan **Perjanjian** ini sebagai hal yang bersifat Rahasia yang tidak boleh diketahui oleh umum, kecuali untuk kepentingan perbankan, audit dan pemeriksaan hukum oleh aparat yang berwenang.
2. **Para Pihak** secara bersama-sama sepakat bahwa ketentuan ayat 1 di atas juga mengikat bagi seluruh karyawan masing-masing pihak.
3. Ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berlaku meskipun **Perjanjian** ini berakhir.

PASAL 22 LAIN-LAIN

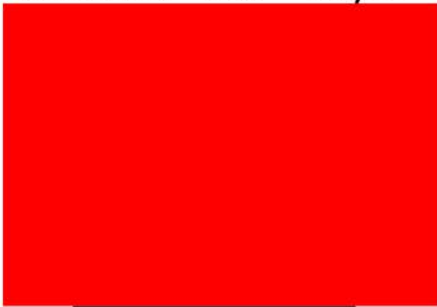
1. **Perjanjian** ini dibuat dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Hal-hal lain atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas Surat **Perjanjian** ini akan diatur dalam Amandemen/Addendum tertulis yang disepakati oleh **Para Pihak** yang seluruhnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 23 PENUTUP

Para Pihak sepakat dan mengakui **Perjanjian** ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat asli ditandatangani secara elektronik dengan materai elektronik oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
WASKITA – BRP – CK, JV



Kuasa WASKITA – BRP – CK, JV

PIHAK KEDUA
PT Lautan Deltamas Sejahtera



Direktur

Mengetahui
PT. WASKITA KARYA (PERSERO), TBK



Kepala Divisi Supply Chain Management



Kontrak Nomor: 00053/SPPM/WK/SCM/WAA/2026

LAMPIRAN D
RINCIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

No	Description	Sat	QTY	Unit Price		Total Price	
				IDR		IDR	
1	2 CMS @ head 90 m						
	Model : ASP700-8601.16 S	Unit	4	IDR 4,828,396,000		IDR 19,313,584,000	
	Type : single-stage, axial split case pump						
	Flow & Head : 2 m ³ /s @ 90 m						
	Materials						
	Volute Casing : Ductile Cast Iron						
	Impeller : Super Duplex						
	Shaft : Duplex Stainless Steel						
	Seal Type : Mechanical Seal						
	Rubber : NBR						
	Efficiency : 94,5 %						
	Size of Inlet & Outlet : DN 800 & DN 700 (PN16)						
	NPSHr : 8,21 m						
	Pump Speed : 994 rpm (6 Pole)						
	Motor Data : 2 350 Kw ; 3 ph ; 6,6 KV, 50 Hz						
	Brand: XEMC, Cooling method						
	CACA, IP 55, Insulation class F,3						
	Phase horizontal wound-rotor						
	induction motor						
	Base Frame : Include Bolt and nut						
2	1CMS @ head 90 m						
	Model : ASP450-880R 5	Unit	2	IDR 3,638,682,500		IDR 7,277,365,000	
	Type : single-stage, axial split case pump						
	Flow & Head : 1 m ³ /s @ 90 m						
	Materials						
	Volute Casing : Ductile Cast Iron						
	Impeller : Super Duplex						
	Shaft : Duplex Stainless Steel						
	Seal Type : Mechanical Seal						
	Rubber : NBR						
	Efficiency : 90,1 %						
	Size of Inlet & Outlet : DN 600 & DN 450 (PN16)						
	NPSHr : 3,79 m						
	Pump Speed : 992 rpm (6 Pole)						
	Motor Data : 1.250 Kw ; 3 ph ; 6,6 KV, 50 Hz						
	Brand: XEMC, Cooling method						
	CACA, IP 55, Insulation class F,3						
	Phase horizontal wound-rotor						
	induction motor						
	Include Bolt and nut						
3	Model : ALTIVAR 6000 ATV6000C163A6666NA5	Unit	2	2,894,225,000		5,788,450,000	
	MV Variable Speed Drive - 1230kW, 6,6 kV						
	Power : 1230 Kw						
	Nominal Current : 120Amps IP42						
	Voltage : 6600 Volt						
4	Model : ALTIVAR 6000 ATV6000C163A6666NA5	Unit	4	3,539,250,000		14,157,000,000	
	MV Variable Speed Drive - 2450kW, 6,6 kV						
	Power : 2450 Kw						
	Nominal Current : 250 Ampere IP42						
	Voltage : 6600 Volt						
	Spesification :						
	- Normal Duty Application : Pump						
	- IEC standard and IEEE 519						
	- Multilevel IGBT : 30 pulse						
	- Enclosure protection : IP41						
	- Enclosure lighting with power socket						





PT. LAUTAN DELTAMAS SEJAHTERA

No	Description	Sat	QTY	Unit Price	Total Price
				IDR	IDR
	- Key switch local/remote - Indicator lamp on front door - Emergency stop button - Motor thermal monitoring (pt100) - Winding Temperature Sensor (pt100) - 10 inch HMI touch screen				
				Jumlah	46,536,399,000
				DPP Nilai Lain	42,658,365,750
				PPN 12%	5,119,003,890
				Jumlah Total	51,655,402,890

Terbilang : Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah

Pihak Pertama
Waskita - BRP - CK JV



Kepala Proyek

Pihak Kedua
PT Lautan Deltamas Sejahtera



Direktur

